

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2024
PENGADILAN NEGERI DENPASAR**



DENPASAR, JANUARI 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR
NOMOR: 71a. /KPN/W24-U1/RA1.10/I/2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

N a m a : H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.
NIP. 195905111984031004

Denpasar, 15 Januari 2024
Pihak Pertama,

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.
NIP. 197012201996031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
PENGADILAN NEGERI DENPASAR
NOMOR: 71a /KPN/W24-U1/RA1.10/I/2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	60%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	60%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak/ pengadilan pengaju tepat waktu.	90%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Terwujudnya Pelaksanaan Dukungan Manajemen guna Peningkatan Pelayanan Pengadilan	a. Persentase Layanan perkantoran pendukung kinerja: - Gaji dan Tunjangan - Operasional Pemeliharaan Kantor;	100%

Kegiatan :

Anggaran :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;

Rp 16.586.393.000,-

2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Rp 846.240.000,-



Pihak Kedua
H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.
NIP. 195905111984031004



Denpasar, 15 Januari 2024
Pihak Pertama
I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.
NIP. 197012201996031002